

ANALISIS KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN DI KALIMANTAN TENGAH

Policy Analysis Of Forest And Land Fire Prevention And Management In Central Kalimantan Province

Muhamad Wahyudi

University Palangka Raya
Central Kalimantan, Indonesia

email:
wahyudifdirun@gmail.com

Abstrak

Berbagai upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan telah dilakukan termasuk mengefektifkan berbagai perangkat hukum dan para pihak terkait, termasuk sampai pada sanksi hukum yang cukup tegas. Namun hingga saat ini upaya tersebut masih dianggap belum memberikan hasil yang optimal. Tahun berganti tahun, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi bencana yang paling mengganggu dan berdampak luas di Kalimantan Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan informan penelitian terdiri dari Gubernur, Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017, kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dalam dua tahapan yaitu kebijakan pencegahan dan kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Namun dalam pelaksanaannya lebih mengutamakan pada kebijakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan karena lebih berdampak baik secara ekonomi, sosial, edukasi dan kesehatan. Upaya pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah terkendala oleh kurang memadainya sumber daya manusia, anggaran yang terbatas serta kurangnya sarana dan prasarana.

Kata Kunci:

Analisi Kebijakan
Pencegahan
Penanganan
Hutan
Lahan

Keywords:

Policy Analysis
Prevention
Handling
Forest
Land

Accepted

Maret 2021

Published

April 2021

Abstract

Various efforts to prevent and deal with forest and land fires have been carried out, including the effectiveness of various legal instruments and related parties, including legal sanctions that are quite firm. However, until now these efforts are still considered not to provide optimal results. Year after year, forest and land fires are still the most disturbing and widespread disaster in Central Kalimantan. The purpose of this study is to analyze the policy of preventing and handling forest and land fires in Central Kalimantan Province and to analyze the factors that influence efforts to prevent and manage forest and land fires in Central Kalimantan Province. The study used qualitative research methods, with research informants consisting of the Governor, Head of the Forestry Service, Head of the Environment Service, Community Leaders and the people of Central Kalimantan Province. The data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation studies, while the data analysis used was an interactive model analysis consisting of data condensation, data display and conclusion drawing/verification. The results showed that in accordance with Regional Regulation Number 5 of 2003 and Governor Regulation Number 24 of 2017, the policy for preventing and handling forest and land fires in Central Kalimantan Province was carried out in two stages, namely prevention policies and policies for handling forest and land fires. However, in its implementation, it prioritizes the policy of extinguishing forest and land fires because it has more economic, social, educational and health impacts. Efforts to prevent and deal with forest and land fires in Central Kalimantan Province are constrained by inadequate human resources, limited budget and lack of facilities and infrastructure.



© 2021 The Authors. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak kerugian yang sangat besar, baik secara materiil maupun non materiil. Pemerintah telah berupaya keras

menyelesaikan permasalahan ini melalui penerbitan berbagai kebijakan, memberikan dukungan kelembagaan, maupun pendanaan. Kenyataannya adalah bahwa bencana kebakaran hutan dan lahan terus berulang.

Indonesia sebagai negara yang secara geografis berada di jalur khatulistiwa memiliki 2 (dua) musim, musim hujan dan kemarau. Antara bulan November sampai Februari, angin barat laut membawa udara lembab ke arah Pantai Timur Laut, Utara, Barat Laut dan Barat dari pulau-pulau di Indonesia. Bulan Pebruari mempunyai sifat yang agak kering dibandingkan bulan Januari terutama pada bagian ekuator yang disebabkan oleh mulai melemahnya monsoon Barat Laut. Selama periode April sampai Oktober, Indonesia dipengaruhi oleh angin Tenggara yang relatif kering berasal dari Australia. Pada bulan Maret terjadi pengurangan curah hujan terutama di sepanjang pantai Tenggara dari Nusa Tenggara dan pada bulan April ini wilayah ini menjadi kering. Mulai bulan Mei aliran udara kering melingkupi hampir seluruh bagian Indonesia dan bulan Juli bagian

Timur dan Timur Laut di Indonesia berada dalam musim kering.

Resiko ancaman kebakaran hutan dan lahan di Indonesia rutin dihadapi pada setiap musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering dengan kandungan air rendah dan permukaan air menurun drastis merupakan kondisi yang menunjang dan rentan terhadap kebakaran. Kondisi cuaca yang ekstrim dengan panas tinggi serta ditambah dengan perilaku beberapa masyarakat yang ceroboh kerap kali menimbulkan kasus kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun. Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia selalu berulang terjadi dari tahun ke tahun. Berikut data luas areal kebakaran hutan dan lahan yang terjadi lima tahun belakangan ini:

Tabel 1. Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha) di Indonesia Tahun 2013-2018

Tahun	Luas Areal Kebakaran Hutan dan Lahan (Ha)
2013	4.918,74
2014	44.411,36
2015	261.060,44
2016	14.604,84
2017	11.127,49
2018	4.666,39

Sumber: Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah diolah.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Republik Indonesia memaparkan bahwa terdapat 11 (sebelas) provinsi di Indonesia yang rentan terjadi kebakaran hutan dan lahan:

Gambar 1. Wilayah Indonesia Yang Rentan Kebakaran Hutan Dan Lahan



Sumber: PWS@bmkgo.id

Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa 11 (sebelas) provinsi tersebut mempunyai jumlah panas (*hotspot*) yang berbeda seperti tabel berikut:

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Titik Panas (per 20 Agustus 2018)

Provinsi	Tahun			
	2015	2016	2017	2018
Aceh	218	431	420	124
Riau	4.965	2.120	600	1.154
Jambi	5.164	183	233	154

Sumatera Selatan	21.767	495	594	348
Sumatera Utara	590	817	245	218
Kep. Bangka Belitung	1.465	262	248	273
Kalimantan Barat	6.156	2.967	2.010	5.252
Kalimantan Timur	6.923	1.380	498	326
Kalimantan Tengah	21.809	724	492	894
Kalimantan Selatan	4.533	199	339	281
Papua	11.134	1.467	861	517

Sumber: Data Akun Resmi Instagram BMKG@infobmkg yang diolah.

Data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan bahwa jumlah titik panas tahun 2019 lebih banyak dibandingkan tahun 2018. Untuk beberapa wilayah, jumlah titik panas juga lebih banyak dibandingkan tahun 2015, yang mencatatkan fenomena el-nino cukup kuat dan kebakaran hutan masif pada saat itu. Jika kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, *hotspot* tahun 2019 sudah melampaui kondisi *hotspot* pada 2018 (Kasubdit Analisis Informasi Iklim BMKG Adi Ripaldi, 2019). Wilayah Riau mencatatkan 4.965 titik panas pada 2015, tetapi pada tahun 2019 wilayah tersebut mencatat sampai 7.257 titik panas. Jambi yang mencatatkan 5.164 titik panas pada tahun, tetapi pada tahun ini angkanya bertambah menjadi 7.941 titik panas. Sementara Kalimantan Tengah juga mencatatkan peningkatan jumlah titik panas dari 21.809 pada 2015 menjadi 24.902 titik panas pada tahun 2019.

B. Studi Literatur

Kebakaran hutan adalah suatu kejadian dimana api melalap bahan bakar bervegetasi yang terjadi di kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali. Berbeda dengan kebakaran hutan, jika api melalap bahan bakar bervegetasi yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali di kawasan bukan hutan maka disebut bakaran lahan. Kebakaran hutan dan lahan didefinisikan sebagai kejadian dimana api melahap bahan bakar bervegetasi, yang terjadi di kawasan hutan dan non-hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali (Syaufina 2008).

Kebakaran hutan/lahan dalam pengertian umum menurut Gaylor (1974) dan Saharjo (2003) mencakup dua macam yaitu kebakaran liar atau yang tidak diinginkan (*wildfire* atau *unwanted fire*) dan kebakaran yang diinginkan atau direncanakan atau pembakaran terkendali (*controlled burning* atau *prescribed burning*). Kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja (Hatta, 2008).

Kebakaran hutan ialah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi karena pembakaran yang tidak dikendalikan, karena proses spontan alami, atau karena kesengajaan. Proses alami sebagai contohnya kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api

yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan antara ranting tumbuhan kering yang mengandung minyak karena goyangan angin yang menimbulkan panas atau percikan api (Notohadinegoro, 2006). Kebakaran yang terjadinya akibat kesengajaan manusia dikarenakan oleh beberapa kegiatan, seperti kegiatan ladang, perkebunan (PIR), Hutan Tanaman Industri (HTI), penyiapan lahan untuk ternak sapi, dan sebagainya (Hatta, 2008).

Di Indonesia istilah inilah yang lebih sering didengar terkait dengan kejadian kebakaran hutan karena kebakaran tidak hanya terjadi di dalam hutan tapi juga di kawasan non-hutan. Saat ini, 70% kebakaran terjadi di lahan (non-hutan) dan 30% di kawasan hutan (Dit. PKH 2010). Kebakaran hutan dapat dikelompokkan pada tiga tipe, dimana pengelompokkan sebut didasarkan kepada bahan bakar yang mendominasi kebakaran. Tiga tipe bakaran (Syaufina 2008), yaitu:

- a. Kebakaran bawah (*Ground Fire*):
Kebakaran bawah yaitu situasi dimana api membakar bahan organik di bawah permukaan serasah. Penjalaran api yang perlahan dan tidak dipengaruhi oleh angin nyebabkan tipe kebakaran seperti ini sulit untuk dideteksi dan dikontrol. Kebakaran bawah adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di lahan gambut.
- b. Kebakaran permukaan (*Surface fire*)
Kebakaran permukaan yaitu situasi dimana api membakar serasah, tumbuhan bawah, bekas limbah pembalakan dan bahan bakar lain yang terdapat di lantai hutan. Kebakaran permukaan adalah tipe kebakaran yang umum terjadi di semua tegakan hutan.
- c. Kebakaran tajuk (*Crown fire*)
Kebakaran tajuk yaitu situasi dimana api menjalar dari tajuk pohon satu ke tajuk pohon yang lain yang saling berdekatan. Kebakaran tajuk sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin. Kebakaran tajuk sering terjadi ditegakan hutan konifer dan api berasal dari kebakaran permukaan.

Kebakaran hutan dibedakan pengertiannya dengan kebakaran lahan, dimana perbedaannya terletak pada lokasi kejadiannya. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi diluar kawasan hutan (Pubowaseso, 2004).

C. Metode

Type penulisan yang penulis gunakan adalah type deskriptif jenis penelitian ini adalah kualitatif, data yang digunakan di peroleh dari sumber yaitu buku-buku ,artikel, dokumen, majalah, surat kabar dan internet.

D. Hasil

Kebakaran hutan dan lahan yang luas dan tak terkendali hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah dimana sebagian besar akibat ulah manusia (anthropogenic) dengan kepentingan utama meliputi untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pengembangan usaha perkebunan atau kehutanan bahkan ada yang terkait dengan menjadi sebuah upaya perlawanan atas konflik lahan. Kebakaran terjadi baik di kawasan hutan, perkebunan ataupun areal penggunaan lainnya. Kebakaran tersebut berdampak kerugian pada aspek lingkungan, sosial dan ekonomi.

Untuk itu perlu adanya kebijakan yang jelas dan tegas dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna melakukan tindakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak menjadi suatu rutinitas kejadian bencana alam di Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Pola umum kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dalam situasi normal dengan status siaga darurat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, kebakaran ditangani oleh Brigade Pemadam Kebakaran. Namun apabila status berubah menjadi darurat bencana, maka penanganan karhutla dilakukan oleh beberapa instansi yang tergabung dalam Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas Dalkarhutla) yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat provinsi dan Bupati/ Walikota untuk kabupaten/kota.

2. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencegah dan menangani kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sudah barang tentu bukan hal yang mudah untuk dilaksanakan sehingga semuanya bisa terselesaikan dan terkendali. Faktor alam di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi penghambat proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla), dengan tanah gambut yang kering, terbatasnya sumber air dan cuaca kering menjadikan kendala dalam pemadaman kebakaran.

E. Pembahasan

teknik pengumpulan data berupa telaah pustaka (library research) dan studi dokumen dengan mengumpulkan literature yang berkaitan dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) dengan mengeluarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/222/2018 tanggal 27 Mei 2019 Tentang Status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Selain itu juga dalam melakukan pencegahan dan penanganan karhutla juga didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2003 serta Peraturan Gubernur Nomor 24 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanganan Darurat Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.

Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mengendalikan karhutla di Provinsi Kalimantan Tengah sehingga tidak menimbulkan dampak yang luas. Pengendalian kebakaran hutan dan lahan merupakan usaha untuk melindungi hutan dan lahan dari kebakaran liar dan penggunaan air untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan hutan (Saharjo et al., 1999). Oleh sebab itu pengendalian kebakaran hutan dan lahan paling tidak mencakup dua komponen yang mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta memadamkan kebakaran hutan dan lahan dengan sesegera mungkin agar api tidak membesar.

1. Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut di Kalimantan Tengah merupakan kejadian yang berulang setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Kebakaran hutan dan gambut ini bukan hanya berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian, sosial, budaya dan transportasi. Penyebab kebakaran hutan dan lahan gambut dapat dikatakan 99% adalah akibat ulah manusia, baik yang dilakukan secara sengaja maupun akibat kelalaian. Faktor alam turut mendukung, seperti kemarau panjang, seperti terjadinya gejala El Nino.

2. Faktor-Faktor Penghambat Upaya Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Lahan dan Hutan

Permasalahan karhutla merupakan kejadian yang berulang dan hampir terjadi setiap tahun, khususnya di musim kemarau dan semakin parah ketika terjadi fenomena iklim ekstrim seperti El Nino. Pengendalian karhutla seringkali susah dilakukan, khususnya di wilayah lahan gambut Provinsi Kalimantan Tengah, karena api membakar tidak hanya di atas permukaan tetapi juga di bawah permukaan.

F. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah guna menjawab perumusan masalah dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 dan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2017 yang dilakukan dalam dua langkah yaitu pencegahan karhutla dan penanganan karhutla.
2. Kebijakan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah sangat dipengaruhi oleh faktor sumber daya manusia, anggaran serta sarana dan prasarana. Secara kuantitatif sumber daya manusia yang tergabung dalam Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah masih kurang memadai sehingga harus minta bantuan personil dari BNPB guna melakukan pemadaman karhutla serta dibantu oleh komunitas masyarakat siaga api sehingga bisa melakukan pemadaman ke titik kebakaran, sedangkan secara kualitas, Satgas Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah belum semuanya memiliki kompetensi dan keahlian dalam teknik pemadaman karhutla sehingga menyebabkan pemadaman memerlukan waktu yang lama.

2. Saran

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam kasus kebakaran hutan dan lahan lebih menitikberatkan pada penanganan yang bersifat refresif yaitu pemadaman kebakaran dan penegakan hukum. Jika dilihat dari penyebab kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah, kebijakan selama ini masih sebatas mengatasi masalah pembukaan lahan yang dilakukan dengan pembakaran. Sementara itu, kebijakan yang menyangkut pencegahan kebakaran hutan dan lahan justru kurang terlalu diprioritaskan, padahal pencegahan ini sangat ramah lingkungan dan memberi manfaat tambahan untuk masyarakat, sehingga saran penulis perlu kebijakan baru berupa kebijakan retrospektif menyangkut kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah.

Daftar Pustaka

Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed, New York.
 ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). 2003. *Guidelines for the implementation of the ASEAN*

policy on zero burning. ASEAN sekretariat, Jakarta.

- Baedhowi. 2009. *Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan: Konsep Dasar dan Implementasi*. Pelita Insani, Semarang.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Putra Grafika, Jakarta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan ke delapan Belas Edisi IV*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*, New Jersey: Pearson Education. Edisi bahasa Indonesia diterjemahkan dari edisi kedua (1994) diterbitkan sejak 1999 dengan judul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, cetakan kelima. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (terjemahan), Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gaylor HP. 1974. *Wildfires Prevention and Control*. Robert J. Brady Company, Bowie, Maryland.
- Hariwijaya, M. & Triton P.B. 2005. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. Oryza, Yogyakarta.
- Hasan, Iqbal. 2002. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Hermawan, W. 2006. *Dampak Kebakaran Kebun dan Lahan terhadap Lingkungan Hidup*. Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat.
- Hogwood, Brian W, and Lewis A. Gunn. 1984. *Policy Analysis for the Real World*. Oxford University Press, New York.
- Indrawijaya, Adam I., 2004. *Perilaku Organisasi*, Edisi Revisi. Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Islamy, Irfan. 1988. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Miles, Mathew B. dan Huberman, A.M. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. UIP, Jakarta.
- Miles, Mathew B. dan Huberman, A.M.. 1984. *Analisis Data Kualitatif*. Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi. UI-Press, Jakarta.

- Morse, Stephen. 1998. *Successful Product Management*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nakamura, Robert T and Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. St. Martins Press, New York.
- Notohadinegoro, T. 2006. *Pembakaran dan Kebakaran Lahan*. Universitas Gadjah Mada Press, Yogyakarta.
- Nugroho D, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Gramedia, Jakarta.
- Nugroho D, Riant. 2008. *Public Policy (Teori Kebijakan, Analisis Kebijakan, Proses Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Management dalam kebijakan publik, Kebijakan Sebagai The Fifth Estate, Metode Penelitian Kebijakan)*. Gramedia, Jakarta.
- Parsons, Wyne. 1997. *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Queen Mary Westfield Collage University, London.
- Parto, Saeed. 2005. *Good Governance and Policy Analysis: What of Institution*. Merit-Maastricht Economic Research, Institute On Innovation and Technology.
- Patton dan Sawicki. 1993. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Prentice Hall: Michigan University, New York.
- Purbowaseso. 2004. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Saharjo B.H. 2003. *Pengertian Kebakaran Hutan*. Di dalam: Suratmo FG, Husaeni EA, Jaya NS, editor. *Pengetahuan Dasar Pengendalian Kebakaran Hutan*. Fakultas Kehutanan IPB, Bogor.
- Nugroho D, Riant. 2016. *Pengendalian Kebakaran Hutan dan atau Lahan di Indonesia*, PT Penerbit IPB Pers, Bogor.
- Sjahrir. 1988. *Kebijaksanaan Negara: Konsistensi dan Implementasi*. LP3ES, Jakarta.
- Sudjana, Nana. 2012. *Penelitian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. CV Alfabeta, Bandung.
- Suharto, Edi. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial)*. Alfabeta, Bandung.
- Sumantri. 1997. *Pencegahan Kebakaran Hutan Melalui Peningkatan Peran Serta Masyarakat Sekitar Kawasan Penyangga*. Ditjen PHKA dan JICA, Bogor.
- Sumantri. 2007. *Pengendalian kebakaran lahan dan hutan, sebuah pemikiran, teori, hasil praktek, dan pengalaman lapangan*. Ditjen PHKAJICA, Jakarta.
- Suprayitno dan Syaufina L. 2008. *Pengendalian Kebakaran Hutan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan dan Korea International Cooperation Agency, Bogor.
- Suratno dan Arsyad, Lincoln. 1995. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. UPP AMPYKPN, Yogyakarta.
- Syaufina L. 2008. *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, prilaku api, penyebab dan dampak kebakaran*. Bayu Media Publishing, Bandung.
- Thoha, Miftah. 1996. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tilaar, H.A.R dan Nugroho, Riant. 2005. *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Thoha, A. 2014. *Model Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Risiko Kebakaran Hutan Dan Lahan Berbasis Masyarakat*. Sekolah Pasca Sarjana. ITB. Bogor.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadidjaja. 1988. *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan; Perkembangan Teori dan Penerapan*. LP3ES, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2002. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Wahab, Solichin Abdul. 2011. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Med Press (Anggota IKAPI), Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. CAPS, Jakarta.
- Ahdiyana, Marita. 2010. Dimensi Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Kinerja Organisasi. *Journal of Applied Psychology*, Vol. 8. No.2: Hal. 1-10.
- Ahdiyana, Marita. 2014. *Meretas asa Kepemimpinan Birokrasi pasca Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN)*, dalam seminar nasional jurusan ilmu administrasi Negara FIS UNY.
- Akbar, A. 2008. Pengendalian Kebakaran Hutan Berbasis Masyarakat Sebagai Upaya Mengatasi Risiko Dalam REDD. *Tekno Hutan Tanaman*, 1 (1), 11–22.
- Akbar, A. 2011. Studi kearifan lokal penggunaan api persiapan lahan : Studi kasus di Hutan Mawas Kalimantan Tengah. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 8(3), 211–230.
- Anderson, James E. 2003. *Critical Thinking Across the Disciplines*. Makalah pada. Faculty Development Seminar in New York City College of Technology, New York.
- Budiningasih, Kushartati. 2017. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis*

- Kebijakan Kehutanan*. Vol. 14 No.2, November 2017: 165-186.
- Chokkalingam U, Suyanto, Permana RP, Kurniawan I, Mannes J, Darmawan A, Khususyiah N, Susanto RH. 2004. *Pengelolaan api, perubahan sumberdaya alam dan pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat di areal rawa/gambut – Sumatera bagian Selatan*. Di dalam: Suyanto, Chokkalingam U, Wibowo P, editor. *Prosiding semiloka Kebakaran Lahan Rawa/Gambut di Sumatera: Masalah dan Solusi*. Palembang, 10 – 11 Desember 2003. Jakarta: CIFOR. Hlm 35-47.
- Darwiati, W. dan F.D. Tuheteru. 2010. Dampak kebakaran hutan terhadap pertumbuhan vegetasi. *Jurnal Mitra Hutan Tanaman*. 3(1): 27-32.
- Hasoloan D. 2001. *Kebijakan Rencana Tata Guna Lahan Untuk Perkebunan dan HTI, Serta Dampaknya Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan di Propinsi Jambi*. Di dalam: Suyanto S, Permana RP, Applegate G, Setijono D, editor. *Prosiding Seminar Sehari Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Aktivitas Sosial Ekonomi dalam Kaitannya 233 dengan Penyebab dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera*. Bogor: Proyek Penelitian Kebakaran Hutan dan Lahan ICRAF dan CIFOR. hlm. 51-65
- Hatta, M. 2008. Dampak Kebakaran Hutan terhadap Sifat-Sifat Tanah di Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat. *Draft Hasil Penelitian*, Departemen Kehutanan Fakultas Pertanian. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Irwansyah, Andrian. (2005). *Analisis Kerusakan Dan Strategi Pencegahan Banjir Rob Akibat Perubahan Iklim Di Jakarta Utara*. Tesis. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Junaedi A. 2010. Wanatani berbasis tanaman karet klonal “Langkah menuju intensifikasi lahan”, Di dalam: Sukmareni, editor. *Catatan pendampingan Orang Rimba menantang zaman Komunitas Konservasi Indonesia Warsi*. Jakarta: KKI Warsi. Hlm 109-121.
- Loren, Aditea Muhammad Ruslan, Fadly H. Yusran dan Fonny Rianawati. 2015. Analisis Faktor Penyebab Kebakaran Hutan Dan Lahan Serta Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Masyarakat Di Kecamatan Basarang Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. *Jurnal Enviro Scientiae*. Vol II Hal 1-9.